

Seperti DKI Jakarta, Banten Bakal Punya Bus Trans Banten

SERANG (IM)- Seperti DKI Jakarta yang mempunyai Trans Jakarta, Provinsi Banten juga bakal memiliki Trans Banten. Rencana pengadaan moda transportasi publik itu sudah ada sejak 2020 lalu. Bahkan, sebagai sarana penunjangnya, Pemprov Banten telah membangun sejumlah halte untuk mendukung bus Trans Banten.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Banten, Tri Murtopo mengatakan, Bus Rapid Transit (BRT) ini rencananya akan dibangun di tiga koridor yakni Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon. Pengoperasian BRT Trans Banten dilakukan untuk membenahi moda transportasi massal di tiga wilayah tersebut. "Rencananya 2025," ujar Tri.

Ia memaparkan, koridor satu bus Trans Banten akan dibangun mulai dari rute perumahan Pondok Cilegon Indah (PCI), Kota Cilegon melalui Kota Serang hingga ke Cikande, Kabupaten Serang. Selanjutnya, koridor dua dari depan Perumahan Alamanda Trondol, Kota Serang, melalui

Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani ke depan Kampus Untirta, Sindangsari, Kabupaten Serang. Kemudian untuk koridor tiga dari Kawasan Banten Lama, Kota Serang melalui jalan Lingkar Selatan Ciracas, ke Baros, Kabupaten Serang.

Tri menerangkan, pembangunan halte untuk menunjang bus Trans Banten itu akan rampung tahun ini. Rutenya juga akan diintegrasikan dengan transportasi publik lainnya seperti stasiun kereta api (KA) dan terminal bus yang melayani penumpang keluar daerah Banten. Meskipun begitu, pengadaan bus untuk Trans Banten itu tak bisa dilakukan dalam waktu dekat lantaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. "Tahap pertama kita akan mengoperasikan bus yang kecil dahulu. Nanti sudah banyak (penggunaannya) akan pakai bus besar," terang Tri.

Rencananya, BRT Trans Banten akan menerapkan subsidi kepada penumpang. Dengan harapan, masyarakat lebih banyak menggunakan transportasi publik ketimbang kendaraan pribadi. ● pra



KIRAB PEMILU 2024 DI BANDUNG

Anggota Paskibra Bandung membawa bendera partai politik peserta Pemilu 2024 saat acara Kirab Pemilu 2024 di Lapangan Tegalega, Bandung, Jawa Barat, Kamis (26/10). Kegiatan tersebut sebagai bentuk sosialisasi dan edukasi guna meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024 yang ditargetkan KPU RI mampu sedikitnya 82 persen di seluruh Indonesia.

Mau Kelola Stadion Internasional Banten, Investor Harus Punya Uang Rp700 Miliar

Sebagai kompensasinya, selain memberikan waktu 50 tahun untuk mengelola kawasan Sport Center yang nanti akan tertuang dalam perjanjian kerjasama, Pemprov Banten juga bakal memberikan beberapa persen ruang terbuka hijau (RTH) yang bisa para investor kembangkan.

SERANG (IM)- Bagi investor yang ingin mengelola Stadion Internasional Banten, Pemprov Banten mensyaratkan investor harus mempunyai uang Rp 700 miliar.

Pj Gubernur Banten, Al Muktabar sudah membuat kriteria bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di kawasan Sport Center tempat stadion bertaraf internasional

itu berdiri.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, Arlan Marzan. "Pak Gubernur sudah membuat kriteria. Salah satunya kewajiban investor di tahun pertama adalah mulai bangun lapangan latihan, kolam renang, parkir," ujarnya.

Kata dia, investor tak

hanya mengelola stadion yang dibangun sejak 2021 lalu, tapi harus membangun sejumlah sarana dan prasarana di kawasan Sport Center yang berada di Kecamatan Curug, Kota Serang itu.

Saat ini, lahan yang tersedia di kawasan tersebut dan belum digarap yakni sekitar 50 hektare. "Bangun semua venue, semua mall, dan lain-lain. Termasuk kita ada opsi untuk sirkuit karena di Serang belum punya sirkuit," terang Arlan.

Ia mengatakan, semua venue antara lain aquatic dan sirkuit akan dibangun investor. Termasuk infrastruktur pendukungnya seperti akses jalan. Namun, tidak termasuk pelebaran ruas Jalan Raya Serang-Pandeglang.

Sebagai kompensasinya,

selain memberikan waktu 50 tahun untuk mengelola kawasan Sport Center yang nanti akan tertuang dalam perjanjian kerjasama, Pemprov Banten juga bakal memberikan beberapa persen ruang terbuka hijau (RTH) yang bisa para investor kembangkan. "Yang bersifat bisnislah. Karena kalau untuk investor harus bisnis kan," tegasnya.

Kata dia, selain menawarkan aset lahan kawasan Sport Center, Pemprov Banten juga menawarkan kebijakan pembangunan seperti kemudahan perizinan. "Banyak lah kebijakan-kebijakan pemerintah. Stadion juga sudah ada. Tinggal digunakan," ujar Arlan.

Ia mengaku adanya pengembangan yang dilakukan investor nantinya bakal

menimbulkan multiplier effect bagi masyarakat. Walaupun pembangunan stadion bertaraf internasional itu dengan meminjam uang dari PT Sarana Multi Infrastruktur, tetapi akan memberikan keuntungan bagi masyarakat.

"Kalau membangunnya sekitar Rp100 miliar, multiplier effect ke masyarakat bisa Rp 500 miliar," harap Arlan.

Ia berharap, dengan adanya investor, maka pembangunan venue di kawasan Sport Center bisa dilakukan dengan cepat sekira dua sampai tiga tahun. Sementara, Pemprov Banten bakal membutuhkan waktu paling cepat 10 tahun untuk membangun Sport Center. "Kalau dengan adanya investasi, dua tahun bisa selesai dan dimanfaatkan oleh masyarakat," pungkas Arlan. ● pra

Dorong Inklusi Keuangan, Pemkab Serang Gelar Gebyar Wisata & UMKM

SERANG (IM)- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menyelenggarakan Gebyar Wisata dan UMKM Padarincang di Desa Padarincang. Kegiatan itu dilakukan sekaligus untuk pencaangan Bulan Inklusi Keuangan.

Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengatakan program Bulan Inklusi Keuangan disambut dengan baik dan perlu diduplikasi ke desa-desa lain di Kabupaten Serang. Menurutnya, Pemkab Serang tengah fokus mengembangkan destinasi-destinasi wisata desa.

"Setiap desa punya potensi yang bisa dikembangkan, dan kita tahu juga ketika desa itu punya destinasi wisata dan wisatawan bisa berkunjung, secara ekonomi bisa bergerak," ujar Tatu dalam keterangan tertulis, Kamis (26/10).

Desa Padarincang dipilih sebagai lokasi kegiatan karena sudah menerapkan sistem inklusi keuangan dalam pengembangan desa wisata dan UMKM. Perhelatan ini pun digelar di Alun-Alun Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang pada hari Rabu (25/10).

Kemudian, Tatu menyatakan perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk OJK dan perbankan dalam pengembangan desa wisata dan UMKM. Saat ini, berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) sudah menurunkan program untuk pengembangan Desa Wisata Padarincang, baik sarana prasarana wisata, in-

frastruktur jalan, promosi, hingga program UMKM.

"Dengan hadirnya Bank Indonesia dan OJK, ini sudah pasti ada solusi dari persoalan untuk modalitas di perbankan. Inklusi keuangan juga perlu banyak disosialisasikan kepada masyarakat. Arah ke depan, transaksi digital masyarakat Kabupaten Serang lebih luas lagi," ucapnya.

Sementara itu, Kepala OJK Regional 1 DKI Jakarta dan Banten, Roberto Akyuwon menerangkan pelaksanaan Gebyar Wisata dan UMKM dilaksanakan dalam rangka memperingati puncak pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan tingkat Provinsi Banten.

"Tujuan akhirnya agar tingkat inklusi keuangan terus meningkat. Inklusi keuangan ialah masyarakat semakin paham dan banyak yang menggunakan produk dan layanan keuangan," katanya.

Menurut Roberto, koordinasi OJK dengan Pemkab Serang cukup baik, sehingga memilih Desa Padarincang sebagai puncak pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan. Adapun temanya dinamakan "Gebyar Wisata dan Pemberdayaan UMKM" karena merupakan desa wisata.

Pada acara ini, juga dilakukan peninjauan ke Desa Wisata Padarincang yang memiliki aneka destinasi. Objek wisata yang berlokasi di aliran Sungai Cikalumpang ini berupa wisata alam dan wahana air, di antaranya, river tubing atau papalindan, river fun offroad, paintball, dan camping ground. ● pra

Walhi: Pemkot Tangerang Minim Upaya Mitigasi Atasi Kebakaran TPA Rawa Kucing

JAKARTA (IM)- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta menilai Pemerintah Kota Tangerang minim dalam upaya memitigasi kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rawa Kucing. Sebab, TPA tersebut telah mengalami kebakaran beberapa kali.

Berdasarkan catatan Walhi DKI Jakarta, TPA yang dibangun sejak 1992 ini setidaknya sudah mengalami kebakaran sepuluh kali sejak 2015 silam. Dua kejadian kebakaran di TPA Rawa Kucing terjadi pada tahun ini. Tepatnya pada 6 September 2023, dan yang terbaru pada 20 Oktober 2023.

Walhi juga mengklaim, jika Pemerintah Kota Tangerang telah abai terhadap peraturan untuk menutup TPA dengan sistem open dumping. Ke-

tentuan tersebut sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Merujuk pada peraturan yang berlaku, semestinya Pemerintah Kota Tangerang sudah meninggalkan sistem pengelolaan sampah open dumping sejak 2013.

"Sampah-sampah tersebut dibiarkan tanpa penanganan dan penutupan dengan tanah, sehingga memiliki banyak risiko. Khususnya kebakaran," tulis Walhi dalam rilisnya, Rabu.

Walhi mengatakan, adanya risiko kebakaran itu semakin diperburuk dengan dekatnya jarak antara TPA Rawa Kucing dengan permukiman warga. Seperti diketahui permukiman warga dengan TPA Rawa Kucing hanya berjarak

sekitar 100 meter.

Walhi menyebut, masyarakat sekitar menjadi kelompok yang terdampak. Selain itu, katanya, masyarakat berpotensi mengalami masalah kesehatan karena pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sistem open dumping itu.

Akibat kebakaran ini, sebanyak 154 masyarakat sekitar TPA Rawa Kucing harus diungsikan. "72 di antaranya merupakan lansia, anak-anak, dan bayi," tulis Walhi.

Selain meminta untuk meninggalkan sistem open dumping, Walhi pun meminta agar Pemerintah Kota Tangerang dan Pemerintah Provinsi Banten menyalurkan bantuan yang layak bagi korban sesuai kebutuhan sehari-hari. ● pp



NELAYAN TERLINDUNGI BPJS KETENAGAKERJAAN DI PADANG

Sejumlah nelayan bersiap melaut di perairan kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (26/10). Pemkot Padang mencatat sebanyak 238 nelayan di kota itu sudah terlindungi dengan BPJS Ketenagakerjaan karena sebagai pekerja informal yang rentan dan berisiko tinggi di laut.



PELUNCURAN LAYANAN PARKIR ELEKTRONIK DI KUDUS

Warga menunjukkan bukti pembayaran melalui Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) saat bertransaksi pembayaran parkir di Jalan Ahmad Yani, Kudus, Jawa Tengah, Kamis (26/10). Pemerintah setempat menerapkan sistem layanan parkir berbasis elektronik atau e-Parkir di sejumlah ruas jalan sebagai wujud transparansi pendapatan daerah dari retribusi parkir serta menghindari adanya pungutan liar petugas parkir.

Flyover Cibodas Tangerang Direhabilitasi, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

TANGERANG (IM)- Proyek rehabilitasi Flyover Cibodas, Cibodas, Kota Tangerang dimulai sejak Rabu, 25 Oktober 2023. Rehabilitasi ini menutup total akses kendaraan untuk naik ke atas flyover, baik dari arah Serang menuju pusat Kota Tangerang maupun sebaliknya. Proyek rehabilitasi ini diperkirakan berlangsung hingga Juni 2024 mendatang.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang, Achmad Suhaery mengatakan bahwa dengan penutupan flyover tersebut akan mengurug lebar jalan yang biasa digunakan. Saat ini, kendaraan masih dapat menggunakan jalur yang berada di bawah Flyover Cibodas. Meski demikian, masyarakat diimbau untuk mencari jalan alternatif lain.

"Ruas jalan yang dapat digunakan tentu berkurang karena Flyover Cibodas tidak dapat diakses. Kendaraan masih bisa melalui jalan yang berada di bawah flyover. Sudah disediakan jembatan sementara juga untuk sepeda motor di kedua arah. Namun, sebai-

knya gunakan jalur alternatif agar tidak terjadi penumpukan kendaraan," ungkapnya.

Untuk jalur alternatif dari arah Serang dapat masuk melalui Pasar Laris Cibodas, kemudian memutar melalui belakang Supermarket Tip Top dan keluar di Perumahan Taman Cibodas. Jalur alternatif lain untuk dari arah Serang dapat melalui Jalan Prabu Kian Santang ke arah Jalan Moh Toha.

"Selain dari arah Pusat Kota Tangerang atau dari arah Jakarta menuju Serang, dapat mengakses Jalan Moh. Toha lalu melewati Jalan Prabu Kian Santang dan masuk kembali ke Jalan Gatot Subroto," lanjutnya.

Meski demikian, Pemkot Tangerang lebih menyarankan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Terlebih masyarakat yang tinggal di area yang dilewati oleh transportasi umum khususnya Bus Tasyo dan angkot Si Benteng. "Kami mengimbau untuk menggunakan transportasi umum sehingga volume kendaraan berkurang dan tidak terjadi penumpukan," tutupnya. ● pp